

ABSTRAK

Kemajuan pesat perkembangan teknologi informatika telah membuat banyak perubahan dalam kehidupan manusia, salah satu diantaranya yaitu pengarsipan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Khusus dalam hukum kenotariatan saat ini belum mengatur mengenai penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris secara elektronik sebagai arsip negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pengaturan dan tanggung jawab notaris dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai arsip negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, formulasi pengaturan mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum karena adanya hambatan-hambatan hukum baik secara substansi, struktur ataupun budaya hukum, sehingga kebutuhan untuk merevisi UUN dengan peraturan yang telah ada merupakan suatu yang perlu untuk dilakukan agar terjadinya kepastian hukum. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, tanggung jawab notaris dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik baik secara murni ataupun tidak murni memiliki implikasi yang berbeda. Penyimpanan arsip elektronik murni tentu melanggar peraturan yang berlaku pada saat ini karena aturan yang berlaku saat ini masih menuntut notaris untuk melakukan penyimpanan arsip secara konvensional mengingat bahwa minuta akta sebagai bagian protokol notaris masih harus dilakukan secara konvensional dengan demikian apabila ada yang menerapkannya maka dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata, sedangkan penyimpanan elektronik tidak murni/*hybrid* tidak dapat diminta pertanggungjawabkan kecuali mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jabatan notaris khususnya dalam penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris secara elektronik masih terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum serta berakibat pada pertanggungjawaban hukum seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, maka dari itu perlu untuk dilakukan reformasi hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, standarisasi internasional penyimpanan elektronik, serta mengadopsi negara lain yang menganut sistem *civil law* seperti Jerman dan Estonia yang telah menerapkan penyimpanan protokol notaris secara elektronik.

Kata Kunci: *Notaris, Protokol Notaris, Elektronik, Arsip Negara, Tanggung Jawab Hukum.*

ABSTRACT

The rapid development of information technology has made many changes in human life, one of which is electronic archiving as regulated in the provisions of Article 1 number 2 of Law Number 43 of 2009 concerning Archives (Archives Law). Specifically in notarial law, currently there is no regulation regarding the electronic storage and maintenance of notarial protocols as state archives.

This study aims to determine and analyze the formulation of arrangements and responsibilities of notaries in storing notary protocols electronically as state archives. The approach method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research specifications. Data collection uses library research using legal materials and field studies using interview techniques. The data analysis method used is qualitative analysis with conclusions drawn using deductive techniques.

Based on the results of the research, the formulation of arrangements regarding the electronic storage of notary protocols occurs a legal vacuum which results in legal uncertainty due to legal obstacles both in substance, structure and legal culture, so the need to revise the UUJN with existing regulations is something that needs to be done for legal certainty. Notaries in carrying out their official duties must have professional ethics and responsibilities, the responsibility of notaries in storing electronic notary protocols either purely or impurely has different implications. Pure electronic archive storage certainly violates the current regulations because the current rules still require notaries to carry out conventional archive storage given that the deed minutes as part of the notary protocol must still be carried out conventionally, thus if anyone applies it, they can be held accountable administratively and civilly, while impure/hybrid electronic storage cannot be held accountable unless it causes harm to interested parties.

The conclusion in this study shows that in the position of notary, especially in the electronic storage and maintenance of notary protocols, there is still a legal vacuum that results in legal uncertainty and results in the legal liability of a notary in carrying out the duties of his position, therefore it is necessary to carry out legal reform by referring to existing laws and regulations, international standardization of electronic storage, and adopting other countries that adhere to the civil law system such as Germany and Estonia which have implemented electronic storage of notary protocols.

Key Words: Notary, Notary Protocol, Electronic, State Archives, legal liability.